

## **DAMPAK PERDAGANGAN BEBAS ASEAN TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA**

**Dr. Dies Nurhayati, M.Pd.  
STKIP PGRI Pasuruan**

Abstrak : *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dimana negara-negara yang berada di kawasan ASEAN dapat melakukan perdagangan bebas untuk melakukan ekspor impor tanpa dikenakan bea cukai dimana terdapat penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya, dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Dengan ditiadakannya biaya masuk untuk setiap barang yang di ekspor oleh negara yang menyepakati perjanjian perdagangan bebas menimbulkan dampak yang positif serta negatif bagi Indonesia, sehingga perlu dilakukan antisipasi yang cepat dan menyeluruh untuk mengatasi adanya dampak negatif dari banyaknya dampak yang ditimbulkan dari perdagangan bebas.

Kata Kunci: Perdagangan Bebas, ASEAN, Perekonomian

*Abstract : ASEAN Free Trade Area ( AFTA ) a form an agreement from the asean countries to form a free zone where the country trade - countries in the area of asean could trade free to do without imposed export import customs tariff which decreased to 0-5 % , the removal of restrictions and obstacles god - other non tariff barriers , in order to increase the competitiveness of regional economic asean .And the the entry fee for each goods in exports by countries that agreed to free trade agreement make the impact positive as well as negative for indonesia , so there needs to be swift and thorough anticipation to overcome the negative impact of the impact caused by the number of free trade .*

*Keywords: Free Trade , ASEAN , Economy*

## I. Pendahuluan

Kawasan Asia Pasifik adalah wilayah yang menunjukkan perkembangan ekonomi yang sangat pesat dalam dekade terakhir ini. Di jantung kawasan Asia Tenggara, terdapat 10 negara ASEAN, yang pada tahun 2015 telah menjadi Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*), yang akan kohesif secara politik, terintegrasi secara ekonomi, harmonis secara budaya dan bertanggungjawab secara sosial. Bank Dunia memprediksi, bahwa pada tahun 2050 kawasan Asia akan mendominasi hingga separuh dari produk domestik bruto dunia, dan dihuni 60% penduduk dunia.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Perbara) atau lebih populer dengan sebutan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh lima negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Tujuan AFTA yaitu: (1) Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global (melalui penghapusan bea dan halangan non-bea dalam ASEAN). (2) Menarik lebih banyak *Foreign Direct Investment* (FDI). (3) Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (*intra-ASEAN Trade*). Pada era globalisasi ini perdagangan bebas antar negara ASEAN semakin marak di Indonesia dimana perdagangan bebas ASEAN kini malah menjadi momok bagi UKM (Usaha Kecil Menengah). Pada dasarnya perdagangan bebas ini tidak berkontribusi secara langsung terhadap perekonomian masyarakat tetapi berpengaruh negatif karena Indonesia masih belum mampu untuk mengeksport di kawasan perdagangan bebas ASEAN.

Sementara itu, dalam masyarakat Asia Timur, ASEAN bersama 6 negara mitra utama (Jepang, Cina, India, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru), telah bertekad untuk mengambil langkah-langkah nyata. Dalam pertemuan ASEAN+6, di Philippina, telah bersepakat untuk pertama, menggunakan ASEAN sebagai kekuatan pendorong untuk integrasi ekonomi, kedua, berorientasi bisnis dengan mendirikan badan yang akan mengimplementasikannya, serta bahkan membuka regionalisme untuk berkontribusi ke liberalisasi global. Oleh karena itu, dalam tulisan ini saya mencoba menguraikan secara mendalam atau menyeluruh tentang dampak perdagangan bebas ASEAN terhadap perekonomian Indonesia.

## **II. Hasil dan Pembahasan**

### **Dampak Perdagangan Bebas ASEAN terhadap Perekonomian Indonesia**

Hubungan Indonesia dengan negara-negara ASEAN salah satunya di bidang perdagangan yaitu AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) yaitu dimana negara-negara yang berada di kawasan ASEAN dapat melakukan perdagangan bebas untuk melakukan ekspor impor tanpa dikenakan bea cukai dimana terdapat penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Dukungan atas orientasi Indonesia dalam pengembangan perdagangan bebas ini tercantum dalam visi dan misi ASEAN *Economic Community* Dinas Perdagangan Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi diantara para pihak; Meliberalisasikan secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu rezim investasi yang transparan, liberal dan mudah.
- (2) Menggali bidang-bidang baru dan langkah-langkah pengembangan yang tepat untuk kerjasama ekonomi yang lebih erat diantara para pihak.
- (3) Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari negara-negara anggota ASEAN yang baru, dan menjembatani perbedaan pembangunan diantara para pihak.

Kepercayaan diri Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kerjasama ekonomi ASEAN tersebut didasarkan pada sejumlah potensi Indonesia yang dapat menunjang kepentingan ekonomi Indonesia. Diantaranya, dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan sebagai negara kepulauan yang sangat

luas menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat besar dan potensial bagi produk-produk dalam dan luar negeri. Indonesia juga dikenal sebagai negara pengekspor berbagai bahan mentah, barang jadi maupun barang konsumsi ke mancanegara. Selain itu, faktor rentang geografis wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, sehingga faktor distribusi dan perdagangan dalam negeri menjadi sangat penting, disamping itu aspek perdagangan internasional juga perlu mendapat perhatian utama sebagai penghasil devisa.

Memperhatikan keanggotaan Indonesia pada pasar bebas di ASEAN merupakan momentum yang tepat. Restrukturisasi arah dan kebijakan perekonomian dengan bertumpu pada pasar dalam negeri dan potensi sumber daya alam nasional untuk menjawab tantangan global dapat dijalankan. Indonesia tidak boleh kehilangan momentum untuk bangkit ke pentas perekonomian dunia sebagai salah satu negara yang layak untuk diperhitungkan.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan pada tanggal 28 Februari 2009 lalu bersama sejumlah menteri Perdagangan ASEAN, Australia dan New Zealand telah menandatangani Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru, atau AANZ-FTA (ASEAN, Australia, New Zealand *Free Trade Area*), yakni perjanjian kerjasama untuk melakukan perdagangan bebas di antara negara-negara tersebut.

Sementara itu perjanjian ASEAN-China sudah berlaku sejak bulan Januari 2010. Bahkan Menteri Perdagangan ASEAN juga telah membahas kerangka kerja penyusunan AFTA dengan Uni Eropa dan India. Pokok dari perjanjian tersebut adalah masing-masing negara akan menurunkan tarif bea masuk barang dan jasa dari negara-negara yang terlibat perjanjian menjadi nol persen dengan tahapan-tahapan yang disepakati. Kemudian dalam hubungan antara Indonesia dan ASEAN bahwa Indonesia melalui ASEAN telah menandatangani kesepakatan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) yang melibatkan negara-negara ASEAN dengan beberapa negara besar dalam bidang perdagangan diantaranya adalah China, Korea, India, Australia dan Selandia Baru yang telah terlaksana pada tahun 2016.

#### **a) Kesiapan Indonesia Menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN**

Masyarakat Ekonomi ASEAN yang merupakan integrasi ekonomi regional pada tahun 2015, memiliki karakteristik berikut : (a) Merupakan basis pasar dan

produksi tunggal, (b) Kawasan ekonomi dengan persaingan tinggi, (c) kawasan dengan pengembangan ekonomi yang diberi kesempatan yang sama, (d) Kawasan yang sepenuhnya terintegrasi dengan ekonomi global.

Masyarakat Ekonomi ASEAN meliputi kerja sama yang luas seperti pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas, pengakuan akan kualifikasi profesional, konsultasi yang erat terkait kebijakan makro ekonomi dan keuangan, pengaturan perdagangan, konektivitas komunikasi dan perkuatan infrastruktur, pengembangan transaksi elektronik, penguatan industri di kawasan yang memungkinkan untuk memajukan sumber-sumber regional, penguatan sektor swasta sebagai pendukung masyarakat ekonomi ASEAN. Singkatnya, pasar masyarakat ASEAN akan mentransformasikan kawasan ini dengan pergerakan bebas arus barang, jasa, investasi, tenaga trampil, dan arus modal.

Dengan adanya pasar terintegrasi yang demikian, maka Indonesia menjadi terbuka dalam persaingan dan pertarungan ekonomi bebas dengan negara-negara di kawasan ASEAN, termasuk secara gradual dengan China, Korea Selatan dan Jepang, di dalam kerangka AFTA (*Asian Free Trade Area*). Sistem pemerintahan Indonesia, dalam era Undang-undang Otonomi Daerah (UU 32 thn 2004), menganut mazhab hampir seluruh kewenangan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan memperkenalkan persaingan antar kabupaten kota. Dengan adanya kesenjangan antar kabupaten/kota di satu sisi, serta diperhadapkan dengan persaingan terhadap pelaku bisnis, lembaga keuangan, dan tenaga profesional dari berbagai negara, tanpa hambatan apapun. Hal ini akan dapat melemahkan atau bahkan mematikan potensi yang ada di daerah. Misalnya, perusahaan menengah kecil di pedalaman kabupaten di Provinsi Riau akan bersaing dengan perusahaan dari negara Singapura, atau Jepang yang infrastruktur, permodalan dan keahlian manajerialnya lebih baik. Demikian juga dengan persaingan antar profesi, misalnya perawat, dokter, notaris, pengacara, sekolah dan lain-lain.

Bahkan hal ini dapat mendorong “inflasi” fasilitas kepada pemodal asing. Masing-masing daerah akan berusaha memberi kemudahan secara bersaing dengan daerah lainnya kepada perusahaan asing untuk menarik investasi. Isu lingkungan, keamanan, konservasi dan kualitas kehidupan dapat tergeser untuk kepentingan persaingan tersebut.

Adanya pasar terintegrasi, membuat negara-negara pada dasarnya telah menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada rezim pasar bebas tersebut. Termasuk diantaranya adalah standarisasi, kuota, pengawasan kualitas barang dan jasa, pengawasan ketat atas subsidi, tarif, pajak dan preferensi. Nasionalisme untuk lebih mencintai produk dalam negeri, adalah sebuah utopia. Konsumen yang rasional, hanya akan membeli barang dan jasa dengan tingkat kualitas lebih baik pada harga yang lebih murah.

Sedangkan apabila ditinjau dari sisi daya saing, berdasarkan *Global Competitiveness Index* yang dirilis *World Economic Forum* (WEF), pada periode 2015-2016 posisi Indonesia masih berada di peringkat ke-37 dari 138 negara, namun untuk periode 2016-2017 turun ke urutan ke-41. Posisi Indonesia ini berada di bawah negara-negara serumpun seperti Singapura (2), Malaysia, (18) dan Thailand (32), kondisi ini bahkan sudah sejak lama.

*Global Competitiveness Index*, yaitu parameter daya saing yang dibuat oleh *World Economic Forum*, meliputi 12 pilar atau indikator yaitu: (1) kelembagaan, (2) infrastruktur, (3) stabilitas makro ekonomi, (4) tingkat kesehatan dan pendidikan dasar, (5) pendidikan tinggi serta intensitas pelatihan-pelatihan, (6) efisiensi dalam usaha perdagangan, (7) pasar tenaga kerja, (8) keunggulan pasar keuangan, (9) ketersediaan teknologi, (10) keterjangkauan pasar, (11) kecanggihan berbisnis, serta (12) kemampuan inovasi.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa apabila tidak ada perubahan untuk perbaikan yang signifikan dalam dua tahun ke depan, maka hampir pasti Indonesia akan tergilas, karena akan kalah bersaing dengan barang dan jasa dari negara lain. PDB Indonesia sebagai indikator makro boleh bertumbuh dan bertambah, tetapi angka tersebut adalah angka yang akan menyesatkan, karena PDB adalah ukuran produksi bruto di satu negara, terlepas yang memiliki faktor produksi tersebut adalah warga negara asing.

Indonesia termasuk negara yang sangat siap untuk menyambut liberalisme pasar bebas dari sisi perundang-undangan, namun tidak memiliki kesiapan sama sekali dari sisi operasional praktis. Hal ini misalnya ditandai dengan terbitnya undang-undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007, yang antara lain menyatakan Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari

negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia (Pasal 6). Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing (Pasal 8), hak atas tanah untuk Hak Guna Usaha selama 95 tahun (Pasal 22).

Memberikan akses dan persamaan yang seperti ini, semestinya harus dipersamakan dulu kemampuan relatif para pemain. Mempertemukan raksasa ekonomi dengan *infant industry* misalnya, hanya akan membuat *infant industry* tersebut menjadi mangsa empuk bagi perusahaan raksasa ekonomi. Hukum alam '*the survival of the fittest*' akan terjadi.

#### **b) Dampak dari Perdagangan Bebas ASEAN terhadap Perekonomian Indonesia**

Era globalisasi saat ini merupakan momentum yang strategis bagi bangsa Indonesia melakukan upaya untuk mensiasati perdagangan bebas dengan anti dumping dan kebijakan non tarif lainnya serta melaksanakan kebijakan tarif yang pro perusahaan skala UKM (Usaha Kecil Menengah) dan memperhatikan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Butir-butir pemikiran sebagai arahan kerja perdagangan pun memuat hal ini. Indonesia berada pada barisan optimis bahwa mampu memanfaatkan peluang keuntungan perdagangan bebas dengan upaya *empowerment* produk domestik dan *encourage* perusahaan Indonesia agar dapat bersaing di pasar domestik dan global.

Dalam hubungan Indonesia dan ASEAN mengenai AFTA bersama negara-negara besar dunia seperti China, Korea, India, Australia dan Jepang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya yang dimaksud perdagangan bebas adalah proses masuknya barang ke wilayah suatu negara yang telah melakukan kesepakatan perdagangan bebas tanpa dikenakan biaya masuk/pajak/biaya tambahan yang dulu dikenakan sebelum adanya kesepakatan perdagangan bebas. Dengan ditiada-kannya biaya masuk untuk setiap barang yang di ekspor oleh negara yang menyepakati perjanjian ke Indonesia maupun setiap barang yang di ekspor oleh Indonesia ke negara yang menyepakati perjanjian perdagangan bebas menimbulkan dampak yang positif serta negatif bagi Indonesia.

Dampak positif dari AFTA ini bagi Indonesia ialah kini produk-produk Indonesia dapat dengan mudah berada di kawasan ASEAN dan negara peserta AFTA, hal ini tentu tidak hanya memberikan keuntungan dengan kemudahan perdagangan

internasional dalam regional ASEAN tetapi juga akan memacu kreativitas dalam pengusaha-pengusaha Indonesia sebab produk-produk negara lain di kawasan ASEAN dan negara peserta AFTA pun akan marak membanjiri pasar Indonesia, sehingga para pelaku bisnis Indonesia dituntut untuk dapat meningkatkan kreativitasnya. Selain itu dampak positif lainnya:

- (1) Mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional.
- (2) Menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor.
- (3) Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri dengan munculnya teknologi baru dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat.
- (4) Melalui impor, kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi.
- (5) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk berkeja.
- (6) Mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara.

Dampak Negatif dari perdagangan bebas terhadap ekonomi politik Indonesia antara lain perusahaan-perusahaan transnasional dan pasar modal dunia membebaskan bisnis dari kekuasaan politik tanpa distorsi oleh intervensi negara. Dikonklusikan bahwa aktivitas bisnis yang primer dan kekuasaan politik tidak mempunyai peran lain kecuali perlindungan sistem terhadap perdagangan bebas dunia. Akibatnya, peran negara sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat semakin tereduksi oleh kekuatan pasar yang tidak mempunyai agenda sosial dan usaha pengentasan kemiskinan. Kondisi ini berimplikasi terhadap relasi sosial yang selalu diukur dari pendekatan dan solusi pasar, serta prinsip ekonomi pasar yang juga dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi berbagai kebijakan, yang selanjutnya akan melahirkan arogansi kekuatan kapital dan negara berperan sebagai 'tukang stempel' bagi mereka. Yang mana dalam hal ini akumulasi modal menjadi prasyarat isi material kelembagaan negara.

Pengaruh ACFTA (ASEAN-China *Free Trade Area*) bagi Indonesia yakni, ACFTA membawa dampak terhadap industri-industri domestik dalam negeri hal ini membawa pengaruh terhadap stabilitas Indonesia. ini dilihat dari dua sektor industri yaitu industri tekstil dan alas kaki. Impor Indonesia dari China untuk barang-barang



tekstil dan alas kaki mengalami peningkatan yang cukup signifikan, penyebabnya adalah harga yang murah dan lebih beragam. Hal ini mengakibatkan pasar domestik dikuasai oleh barang-barang China sehingga barang buatan dalam negeri tidak mampu bersaing.

Banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian ACFTA ini membawa pemerintah melakukan strategi demi menyelamatkan industri-industri dalam negeri salah satunya dengan melakukan peningkatan daya saing, memproteksi produk dalam negeri sehingga produk-produk impor tidak menguasai pasar dalam negeri sehingga mampu tercipta peluang yang lebih besar untuk produk-produk dalam negeri menguasai pasar sendiri serta mengambil kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia.

Selain itu walaupun ACFTA banyak membawa pengaruh negatif terhadap industri-industri dalam negeri akan tetapi Indonesia masih bisa mendapatkan peluang yaitu dengan meningkatkan ekspor produk-produk unggulan dalam negeri, Indonesia harus jeli melihat peluang yang ada agar dapat mengambil keuntungan yang mampu menopang perekonomian Indonesia. Sementara itu, tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam bidang perdagangan luar negeri adalah bagaimana meningkatkan daya saing terhadap ekonomi negara-negara kawasan yang makin meningkat pertumbuhan dan produktifitasnya

Sementara itu, hambatan yang dihadapi Indonesia dalam AFTA yakni banyak anggapan bahwa AFTA hanya menghasilkan persaingan yang tidak seimbang bagi negara anggota ASEAN itu sendiri. Penurunan tarif barang bagi barang yang masuk dari negara anggota ASEAN menimbulkan kerugian. Ketidaksiapan pasar industri lokal juga yang menjadi kendala bagi berjalannya AFTA dan penerapan penurunan tarif.

Seperti negara-negara anggota ASEAN lainnya, Indonesia pun mengalami hal yang sama. Daya saing barang yang diperdagangkan kurang memenuhi standar yang ditetapkan, hal ini mengakibatkan banyaknya industri-industri kecil dan menengah di Indonesia mengalami kerugian yang besar. Persaingan produk dalam negeri dengan produk yang masuk kedalam negeri membuat para pengusaha harus bisa meningkatkan kualitas barang produksinya. Hal tersebut tidak mudah dengan keterbatasan modal yang dimiliki oleh para pengusaha-pengusaha kecil dan

menengah. Belum lagi keterbatasan dari segi infrastruktur di Indonesia, keterbatasan teknologi yang menunjang produksi para pengusaha kecil dan menengah di Indonesia juga menjadi suatu masalah tersendiri. Dalam AFTA para pengusaha dipaksa untuk memiliki daya saing yang tinggi, agar nantinya pengusaha-pengusaha dalam negeri ini dapat mandiri.

**c) Solusi dalam Menyelesaikan Permasalahan Perdagangan Bebas ASEAN terhadap Indonesia**

Melihat dampak yang lebih banyak merugikan tersebut, kiranya perlu dilakukan antisipasi yang cepat dan menyeluruh. Dalam mengantisipasi dampak-dampak perdagangan bebas yang cenderung kurang menguntungkan bagi Indonesia tersebut, ada beberapa upaya yang telah ditempuh maupun belum ditempuh oleh pemerintah. Beberapa bentuk upaya antisipasi yang belum maupun sudah ditempuh Indonesia antara lain:

- (1) Memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk lebih mencintai produk dalam negeri dengan terus meningkatkan mutu produk-produk dalam negeri agar lebih berkualitas. Misalnya dengan menggiatkan program Aku Cinta Produk Indonesia (ACI).
- (2) Melakukan negosiasi ulang kesepakatan perdagangan bebas itu atau minimal menundanya, terutama untuk sektor-sektor yang belum siap.
- (3) Seleksi produk untuk melindungi industri nasional.
- (4) Mencabut pungutan retribusi yang memberatkan dunia usaha di daerah, agar industri lokal menjadi lebih kompetitif.
- (5) Pengetatan pemeriksaan barang masuk di pelabuhan harus dilakukan juga, karena negara lain juga melakukan hal yang sama.
- (6) Memberikan kemudahan dalam bentuk pendanaan, dengan cara kredit usaha dengan bunga yang rendah.
- (7) Mengaktifkan rambu-rambu nontarif, seperti pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI), ketentuan label, dan sejumlah peraturan lainnya terkait dengan pengamanan pasar dalam negeri.
- (8) Memperbaiki berbagai kebijakan ekonomi untuk menghadapi perdagangan bebas.

Strategi menghadapi perdagangan bebas ASEAN-China, antara lain:

- (1) Meningkatkan daya saing, pengamanan perdagangan dalam negeri serta penguatan ekspor. "Untuk penguatan daya saing, pihak kementerian akan melaksanakan pembenahan infrastruktur dan energi, pemberian insentif, membangun KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), memperluas akses pembiayaan dan pengurangan biaya bunga, pembenahan sistem logistik, pelayanan publik, serta penyederhanaan peraturan dan meningkatkan kapasitas kerja."
- (2) Strategi pengamanan pasar domestik akan difokuskan kepada pengawasan tingkat border (pengamanan) serta peredaran barang di pasar lokal. Namun pihaknya juga akan melakukan promosi penggunaan produksi dalam negeri.

Sedangkan untuk penguatan industri, pihak Kementerian Perdagangan berupaya mengoptimal-kan peluang pasar China dan ASEAN sekaligus penguatan peran perwakilan luar negeri. Kementerian berusaha mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di forum internasional, menjaga pertumbuhan ekonomi, menekan kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan lainnya. Kementerian Perdagangan juga telah menetapkan beberapa program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan daya saing komoditi ekspor serta mengamankan perdagangan dalam negeri.

### **III. Penutup**

Hubungan Indonesia dengan negara-negara ASEAN salah satunya di bidang perdagangan yaitu AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) yaitu dimana negara-negara yang berada di kawasan ASEAN dapat melakukan perdagangan bebas untuk melakukan ekspor impor tanpa dikenakan bea cukai dimana terdapat penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Di Indonesia dampak perdagangan bebas memiliki dampak positif dan dampak negatif khususnya bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Perlu dilakukan antisipasi yang cepat dan menyeluruh akibat dari banyaknya dampak yang ditimbulkan dari perdagangan bebas, terutama perdagangan bebas antara Indonesia dengan China.

## Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK & Dikti. 2017. *Memperbaiki Daya Saing Indonesia*, (Online),

(<http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/index.php/2017/04/11/memperbaiki-daya-saing-indonesia/>), diakses 24 Mei 2017.

Lutfiyanto. 2014. *Dampak Perdagangan Bebas ASEAN Terhadap Perekonomian Indonesia*, (Online),

(<https://www.google.co.id/amp/s/lutfiyanto236.wordpress.com/2015/06/11/makalah-perdagangan-bebas-asean/amp/>), diakses 24 Juni 2017.